

BAB III

DINAMIKA HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DENGAN TURKI ERA KEPEMIMPINAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Pada bab ini penulis akan membahas bagaimana kerjasama pariwisata yang berlangsung antara Indonesia dengan Turki yang meliputi sejarah hubungan diplomasi Indonesia dan Turki, diplomasi budaya Indonesia di Turki, perkembangan serta dinamika dalam hubungan bilateral Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Republik Turki.

Hubungan bilateral Indonesia dengan Turki di era Presiden Susiolo Bambang Yudhoyono terhitung baik seperti yang telah dilakukan oleh Presiden - Presiden Indonesia sebelumnya. Jalinan berbagai kerjasama antar kedua negara yang telah berlangsung lama menjadi semakin mempererat hubungan kedua negara. Kerjasama yang dijalin meliputi berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, hingga di bidang militer. Hubungan baik kedua negara ini pun diselimuti oleh berbagai kepentingan yang menimbulkan dinamika dalam keberlangsungan hubungan kedua negara.

Hubungan antara Indonesia dengan Turki terbilang sangatlah erat. Seperti pepatah jauh di mata dekat dihati. Kesamaan yang dimiliki oleh kedua bangsa ini menjadikan hubungan kerjasama bilateral memiliki emosional persaudaraan. Mulai

dari sistem negara nya hingga kondisi sosial masyarakatnya yang sama antar kedua negara.

Hal itu seolah menjadikan motivasi untuk terus mengadakan kerjasama bilateral dalam berbagai area antar kedua negara ini. Kemudian seperti pada umumnya dalam menindak lanjuti setiap nota kesepahaman kerjasama bilateral negara akan terdapat berbagai entrik. Oleh karena itu tentu akan adanya gerakan atau dinamika yang menghiasi dalam proses hubungan kerjasama tersebut.

A. Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Turki

Secara historis, awal mula hubungan Indonesia dengan Turki dimulai sejak abad ke 12. Saat itu pelajar Turki yang mengunjungi Indonesia membawa misi penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia. Pelajar Turki membawa dan menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara berdakwah di wilayah Indonesia yang bermula dari wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (Ministry of Foreign Affairs n.d.).

Sejarah pun telah membuktikan bahwa hubungan kedua negara sebenarnya sudah dimulai sejak abad ke 16. pada saat itu Turki dibawah kepemimpinan Utsmaniyah mengadakan ekspedisi ke Indonesia tepatnya ke wilayah Aceh. Alasan kaum *Utsmaniyah* mengadakan ekspedisi tersebut adalah untuk merespon permintaan dan membantu Kesultanan Aceh dalam konflik dengan penjajah Portugis di wilayah Malaka (Ministry of Foreign Affairs n.d.). Dimana pada saat itu, Aceh yang merupakan salah satu provinsi Republik Indonesia di era modern, adalah negeri Imperium Utsmani

di wilayah Asia Timur. Kemudian hal ini juga diekspresikan dengan kemiripan bendera kerajaan Aceh tempo dulu dengan bendera Turki Utsmani, yaitu berlatar belakang Bulan Sabit (Baddal 2015).

Seiring berjalan waktu, hubungan antar kedua negara semakin baik dan masuk ke ranah yang lebih serius. Hal itu dikarenakan sistem dalam negeri di kedua negara tersebut berangsur menjadi negara yang berdaulat dan berdemokrasi tinggi serta menuntut kedua negara ini untuk memiliki politik luar negeri yang bebas aktif dan strategis. Seperti negara Republik Turki yang sebelumnya menganut sistem pemerintahan otoriter, merubah sistem menjadi demokrasi. Meskipun awalnya hanya dengan menggunakan sistem satu partai (Zurcher 2003).

Kemudian pengakuan secara kedaulatan antar kedua negara yang menjadikan hubungan bilateral menjadi formal dan intens sesuai dengan undang – undang serta peraturan yang ada di dunia internasional. Negara Indonesia mengakui kedaulatan negara Republik Turki pada saat negara Turki memproklamasikan kemerdekaan bulan Oktober tahun 1923. Kemudian negara Turki mengakui Indonesia pada 29 Desember 1949 dan hubungan diplomatik telah dibangun pada 1950. Dan 8 (delapan) tahun kemudian, Kedutaan besar Turki di Jakarta telah dibuka pada tanggal 10 April 1957 (Ministry of Foreign Affairs n.d.).

Republik Indonesia dan Republik Turki sama-sama anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), D8 (komunitas Islam untuk perekonomian dan

pembangunan), dan G20. Kedua negara juga aktif dalam dialog antarperadaban (Dialogue Among Civilization). Keterlibatan dalam berbagai forum internasional tersebut menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral dan jalinan kerjasama yang disepakati dalam berbagai bidang lainnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa Ini modal, opportunity, yang baik untuk bersinergi memainkan peran di forum internasional (Malau 2010).

Dalam pengakuan ikatan berkembang sejak tahun 2004, kedua negara sepakat untuk meningkatkan hubungan kemitraan strategis pada bulan April 2011 ketika Presiden ke-11 dari Turki, Abdullah Gül mengunjungi Indonesia untuk bertemu dengan Presiden ke-6 dari Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Selama kunjungan mereka menandatangani deklarasi bersama yaitu Turki dan Indonesia : Menuju Kemitraan Ditingkatkan dalam pengaturan New World, yang tetap menjadi dasar yang kuat dari hubungan bilateral hingga saat ini (Ministry of Foreign Affairs n.d.).

Kemudian hubungan dalam bidang ekonomi terus ditingkatkan hingga merambah pada ekonomi kreatif di bidang pariwisata. Dalam hal ini Indonesia dapat menuntut ilmu dan belajar dengan Republik Turki mengenai bagaimana pengolahan sumber daya alam wisata yang dimiliki Indonesia dan kemudian menjadikan sektor pariwisata nasional Indonesia menjadi pariwisata berkelas internasional seperti Turki. Dengan itu Indonesia dapat memaksimalkan hasil yang diperoleh untuk kemudian menyokong perekonomian negara seperti negara Turki.

Dalam bidang pendidikan, hubungan bilateral antar kedua negara melalui berbagai media. Salah satunya melalui sekolah buatan Turki yang sudah lama beroperasi di Indonesia yang bernama PASIAD (*Pasifik Ulkeleri Sosyal ve Iktisadi Dayanisma Denergi*). Indonesia dan Turki telah memiliki MoU bidang pendidikan yang mengatur pendirian Sekolah Turki di bawah yayasan pendidikan PASIAD di beberapa kota di Indonesia (K. L. Indonesia n.d.).

Sekolah ini telah menghasilkan banyak peserta didik yang kemudian tidak sedikit yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Turki untuk melanjutkan studi ke Turki langsung. Hal tersebut disambut baik oleh pemerintah Indonesia terlihat dari Indonesia menyikapinya dengan turut memberikan beasiswa bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan studi di Turki.

B. Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Turki

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Turki ini telah dimulai sejak tahun 1957. Hal tersebut ditandai dengan dibangun dan dibukanya kantor kedaulatan Republik Turki di Indonesia pada 10 April pada tahun tersebut (Ministry of Foreign Affairs n.d.). Kantor Kedutaan Turki tersebut dibangun dengan tujuan untuk menangani permasalahan yang mencakup urusan administratif antara negara Turki dan Indonesia. Namun sebelumnya hubungan negara Indonesia dengan negara Turki telah terjalin pada 29 Desember 1949 dimana waktu itu Turki mengakui secara *de jure* atas kemerdekaan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Ketertundaan

hubungan bilateral kedua negara tersebut dikarenakan situasi politik di kedua negara yang sedang kurang kondusif.

Namun dalam perjalanannya, hubungan diplomasi antara Indonesia dan Turki tidak selamanya berjalan mulus. Terdapat dinamika dalam hubungan kedua negara, salah satunya ditandai dengan tidak adanya kunjungan kenegaraan antara Indonesia dan Turki sejak tahun 1985. Hal ini dikarenakan fokus masing-masing negara yang berbeda saat itu. Indonesia lebih memfokuskan pada hubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Asia Tenggara. Sedangkan Turki lebih memilih untuk menjalin hubungan dengan Eropa sehubungan dengan keinginannya untuk bergabung dengan Eropa dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara di lingkup kawasan regionalnya.

Setelah tahun tersebut, kunjungan presiden baru berlanjut pada tahun 1995. Pada tahun tersebut, Presiden Turki saat itu, Süleyman Demirel, mengunjungi Indonesia guna menghadiri tahun pertama pembukaan sekolah PASIAD (*Pasifik Ulkeleri Sosyal ve İktisadi Dayanisma Denergi*) di Indonesia serta memfasilitasi kerjasama ekonomi kedua negara. Pada periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden, Indonesia dan Turki telah memiliki tanggung jawab dalam menindak lanjuti beberpa nota kesepahaman kerjasama antar kedua negara tersebut. Kelanjutan kesepakatan kerjasama yang diteruskan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode pertama nya menjabat telah dilakukan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang dan cukup strategis. Kunjungan Presiden Susilo Bambang

Yudhooyono ke Turki menandai hubungan tersebut masih berjalan dengan baik. Di periode pertama tersebut, Indonesia juga telah mengadakan hubungan kerjasama bilateral dengan Turki di berbagai bidang.

Secara perkembangannya, hubungan bilateral antara negara Turki dengan Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semakin meningkat. Hubungan yang dijalin diantara kedua negara merambah hingga sektor perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan Hubungan bilateral Republik Indonesia dan Turki dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Pada tahun 2005, volume perdagangan kedua negara senilai hampir 635 juta dolar AS. Pada tahun 2008, jumlah itu meningkat menjadi sekitar 1,3 miliar dolar AS dengan surplus ada pada Indonesia. Perinciannya, ekspor Indonesia sebesar 678 juta dolar, sedangkan impor sekitar 587 juta dolar AS (Malau 2010).

Oleh karenanya faktor politik dan kepentingan negara dapat mempengaruhi kerjasama bilateral tersebut. Hal ini yang dapat menjadikan hubungan bilateral kedua negara tidak selalu berjalan sehaluan atau dapat berhenti sejenak. Dalam hal ini, Turki sebagai negara Demokrasi yang sempat berkiblat ke negara negara Eropa dengan tujuan memperoleh kesempatan untuk bergabung dengan Uni Eropa menjadikan fokus dengan kerjasama dengan negara negara Asia termasuk Indonesia berkurang intensitasnya.

Namun secara keseluruhan dinamika yang ada tersebut menjadikan Indonesia dan Turki sebagai rival bilateral yang memiliki prospek baik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan Turki sebagai negara sahabat yang dapat dijadikan rival bilateral baik yang dapat memajukan masing masing negara (Malau 2010).

Pada periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat, hubungan bilateral Indonesia dengan Turki semakin erat. Kerjasama ekonomi, militer, dan lainnya yang dibangun semakin produktif.

Pada tanggal 28 Juni – 1 Juli 2010, Presiden SBY telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Turki pada atas undangan Presiden Turki. Dalam kunjungan tersebut ditandatangani 8 perjanjian kerjasama di bidang Industri Pertahanan, Tenaga Kerja, Industri Kecil dan Menengah, Pertukaran Budaya, Pertukaran Program dan Berita, Kerjasama Teknik, dan Kerjasama Penanaman Modal (K. L. Indonesia n.d.).

Hal tersebut direspon dengan baik oleh pemerintah Turki. Pada tanggal 4 – 6 April 2011 Presiden Turki, Abdullah Gül telah melakukan kunjungan kenegaraan balasan ke Indonesia. Dalam kunjungan tersebut ditandatangani 3 (tiga) persetujuan yaitu: Persetujuan Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik Diplomatik dan Dinas RI – Turki, Persetujuan mengenai Konsultasi Bilateral dan Persetujuan Kerjasama Pengelolaan Bencana Alam (K. L. Indonesia n.d.).

Pada kerjasama ekonomi perdagangan, Indonesia dan Turki membentuk asosiasi perdagangan. Berdasarkan data Kemenperin, neraca perdagangan kedua

negara relatif masih kecil. Nilai impor Turki dari Indonesia pada 2010 tercatat sekitar US\$1,48 miliar, sedangkan ekspor Turki ke Indonesia hanya US\$250 juta. Nilai impor Turki dari Indonesia ini hanya berkontribusi 0,8 persen dari total impor negara tersebut (K. I. Indonesia n.d.).

Kemudian pada tahun 2013 neraca perdagangan Indonesia-Turki surplus 1,6 miliar dolar AS dari total volume perdagangan kedua negara yang mencapai 2,2 miliar dolar AS. Sedangkan nilai ekspor Indonesia ke Turki mencapai 1,9 miliar dolar AS dengan impor senilai 300 juta dolar AS. Volume perdagangan tersebut meningkat 500 juta dolar AS dibanding tahun sebelumnya senilai hanya 1,7 miliar dolar AS (Fauziah 2014).

Republik Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga diketahui memiliki visi pembangunan salah satunya visi dalam pembangunan militer negara. Turki sebagai rival bilateral Indonesia ini juga dikenal dengan kepemilikan pertahanan yang baik. Sebagai anggota Organisasi Perataan Atlantik Utara (NATO), Turki memiliki 700.000 tentara aktif, 230 unit pesawat tempur f-16 serta alutsista berkelas dunia lainnya. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia menganggap penting untuk mengembangkan serta memanfaatkan kerjasama di bidang pertahanan dengan Turki ini agar dapat belajar untuk menciptakan dan berinovasi dalam pembuatan alat militer pertahanan (Kawilarang 2010).

Republik Turki memang dikenal sebagai salah satu inovator dalam pembuatan alat berat, salah satunya alat pertahanan militer. Sebuah prestasi yang baik juga diterima oleh produsen alat militer yang dimiliki Turki yaitu perusahaan Aselsan dan TUSAS. Kedua perusahaan tersebut termasuk dalam 100 perusahaan militer terbesar dunia. Oleh karenanya, Turki berpotensi untuk menguasai pasar alat pertahanan Eropa, Asia, Timur Tengah dan Afrika dan menjadi pesaing yang diperhitungkan oleh perusahaan-perusahaan militer lainnya dari negara barat.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan dalam kebijakan yang dituangkan dalam kerjasama militer adalah mengadakan kerjasama dengan Turki dalam pembuatan Tank militer yang di mulai pada tahun 2013. Tank yang akan dibuat nantinya akan digunakan untuk kebutuhan militer Republik Indonesia dan Turki.

Di pihak Indonesia, produksi tank Republik Indonesia - Turki akan melibatkan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pindad dan PT Len Industri. PT Len merupakan mitra perusahaan Aselsan asal Turki yang sudah berpengalaman memproduksi peralatan komunikasi militer taktis dan sistem pertahanan elektronik untuk Angkatan Bersenjata Turki (Anggi Kusumadewi 2013).

Sementara dari pihak Turki, pada proyek tank bersama Indonesia ini akan ditangani oleh kontraktor pertahanan Turki, FNSS Defense System, yang kerap memproduksi roda kendaraan tempur lapis baja dan senjata untuk militer Turki dan

sekutunya. Dari segi teknologi, FNSS jelas lebih maju dari PT Pindad. Ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk menerima transfer teknologi dari Turki.

Kemudian pada tahun 2004, terdapat kunjungan Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia pasca terjadinya tsunami di Aceh, yang kemudian dibalas dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Istanbul, Turki (Sally 2015).

C. Diplomasi Budaya Indonesia Di Turki

Sistem kebijakan luar negeri Indonesia mengenal diplomasi kebudayaan bukan sebagai sebuah cabang ilmu diplomasi yang masih sangat baru, akan tetapi media kerjasama ini telah berkembang dengan memanfaatkan transformasi nilai – nilai kebudayaan yang ada. Sebelumnya model kerjasama seperti ini hanya dibatasi dalam pengertian alat untuk mengelolah hubungan antar bangsa dan menganggap kebudayaan hanya pada sebatas kesenian (bersifat mikro). Namun seiring dengan adanya perkembangan dalam tatanan hubungan antar negara maka diplomasi kebudayaan pun kini mengalami asimilasi sehingga bersifat makro yang menganggap bahwa esensi kebudayaan dalam gaya berdiplomasi semakin luas samapai dengan nilai – nilai ideologi, nasionalisme ataupun globalisasi.

Transformasi politik pemerintahan yang pernah melanda republik Indonesia dari corak sistem pemerintahan otoriter sejak tahun 1998 kini menjadi tanggungjawab negara untuk menekankan politik pencitraan sebagai suatu basis kekuatan untuk

melakukan diplomasi Internasional. Sebagai negara bekas rezim otoriter Indonesia pun kini memiliki agenda strategis untuk memperoleh pengakuan sebagai negara dengan sosok baru yang lebih demokratis di mata internasional sehingga dapat diterima dalam pergaulan dunia. Misalnya saja politik pencitraan yang dilakukan Indonesia sebagai langkah strategis untuk memberikan kepercayaan dan *image* positif terhadap salah satu negara mitra kerjasama yaitu Republik Turki.

Dukungan Internasional pascareformasi merupakan salah satu faktor penting untuk memperkuat legitimasi Indonesia serta menumbuhkan kepercayaan terhadap rezim pemerintahan yang baru kepada pemerintahan Turki. Melalui politik pencitraan tadi maka segenap upaya teknis dilakukan pemerintah Indonesia untuk meyakinkan sekaligus menghilangkan stigma negatif yang pernah melekat yaitu sebagai negara tidak aman, sarang teroris, rawan kekerasan, rawan akan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dsb. Sebab stigma ini tidak hanya bisa mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri tetapi juga akan berpengaruh pada hubungan bilateral negara tertentu.

Diplomasi kebudayaan nasional yang dilakukan Indonesia dewasa ini memerlukan manajemen modern dengan melibatkan partisipasi aktif dan menyeluruh dari kalangan masyarakat. Peran diplomasi kebudayaan bagi Indonesia disinyalir bahwa diplomasi media ini tidak kalah pentingnya dengan operasi militer, bahkan dalam kondisi seperti saat sekarang ini di tengah kebijakan *soft power*, maka diplomasi kebudayaan sangat penting dalam membina hubungan antar negara. Diplomasi

kebudayaan yang digencarkan Indonesia pada tahun ini dinilai semakin aktif karena diplomasi kebudayaan akan berdampak langsung terhadap pengaruh sosial dan ekonomi yang dapat bersifat jangka panjang.

Sebagai salah satu institusi negara yang berperan sekaligus bertanggungjawab menanganani bidang *public relation* antar negara – negara di dunia, Departemen Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memegang peran penting dalam alur sistemik diplomasi kebudayaan. Institusi yang memiliki visi dan misi untuk mewujudkan Indonesia bersatu, aman, adil, demokratis dan sejahtera untuk meningkatkan citra Indonesia di masyarakat Internasional melalui pengoptimalan peran informasi. Selain itu upaya yang dilakukan sebagai salah satu sasaran kebijakan dari kemenlu adalah mengoptimalkan diplomasi sosial budaya dan diplomasi kemanusiaan, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam rangka pelaksanaan diplomasi total, melaksanakan diplomasi publik dalam implementasi kebijakan politik luar negeri Indonesia (Kemenlu n.d.).

Mengetahui akan pentingnya peran serta elemen masyarakat (*civil society*) serta aktor non – pemerintah (*non-state actors*) dalam level hubungan diplomasi publik maka kebijakan dari kementerian luar negeri akhirnya memutuskan untuk membentuk Direktorat Diplomasi Publik. Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri RI pertama kali dibentuk berdasarkan surat keputusan menteri luar negeri RI nomor 053/OT/II/2002/01, tanggal 1 Februari 2002 tentang organisasi dan tata kerja departemen luar negeri. Pada tahun 2005 organisasi dan tata kerja departemen luar

negeri diperbaharui berdasarkan peraturan menteri luar negeri No. 02/A/OT/VIII/2005/01 tahun 2005, tanggal 19 Agustus 2005 (Kemenlu n.d.).

Direktorat diplomasi publik berada dalam lingkup direktorat jenderal informasi, diplomasi publik, dan perjanjian internasional mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang diplomasi publik mengenai kebijakan politik luar negeri kepada publik di dalam dan luar negeri di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu aktual dan strategis. Seperti peran yang dijalankan Direktorat Diplomasi Publik dalam mendukung politik luar negeri antara lain :

- (a) Pemberdayaan kaum moderat Indonesia
- (b) Memajukan *people to people contact*
- (c) Diseminasi informasi mengenai politik luar negeri
- (d) Merangkul dan mempengaruhi publik dalam dan luar negeri
- (e) Mengumpulkan saran dan masukan bagi pelaksanaan politik luar negeri

Keterlibatan akan komponen masyarakat terkait hubungan diplomasi kebudayaan yang dilakukan Indonesia terhadap negara Turki di era globalisasi serta perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi, sudah seperti menjadi suatu keharusan karena tingkat kompleksitas masalah diplomasi di era globalisasi tidak seluruhnya dapat dikoordinir oleh para pembuat kebijakan. Keterlibatan oleh mereka para ahli dalam menekuni diplomasi Publik (kebudayaan) yang berada di luar jalur pemerintah atau yang disebut sebagai masyarakat epistemik (*epistemic community*)

memang sangat dibutuhkan sebagai *public relation* dalam komunikasi budaya. Mereka yang terlibat dalam aktivitas media ini sebut saja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi (dosen), pengusaha, aktivis buruh, mahasiswa, organisasi swasta, pelajar, peneliti dan elemen masyarakat lainnya.

Sumber masyarakat (*societal sources*) merupakan sumber yang berasal dari lingkup internal. Sumber politik luar negeri yang salah satunya mencakup faktor kebudayaan dan sejarah serta perubahan – perubahan opini publik. Penerapan akan diplomasi yang mencakup sektor kebudayaan sejarah ini meliputi nilai, norma, tradisi dan pengalaman masa lalu yang mendasari hubungan antar anggota masyarakat. Tetapi dalam realita saat ini bahwa hubungan kerjasama terhadap negara Turki terlebih pada bidang kebudayaan masih didominasi oleh masyarakat sipil maupun ornop (organisasi non pemerintahan) meskipun hanya dalam skala kecil.

Kemudian salah satu bentuk kegiatan diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh pelajar Indonesia di Kota Kesan, Turki adalah pagelaran festival kesenian tari-tarian tradisional yang bertajuk “*7th Keşan Culture and Tourism Festival*” tahun 2009 silam. Bentuk interaksi yang dilakukan oleh para aktor diplomasi publik ini menampilkan kesenian dari kolaborasi tarian – tarian nusantara seperti tari saman, nganjoreng, yapong, rentak, piring, pukot dan tari geleng. Mereka berpartisipasi bersama 6 negara lainnya seperti Spanyol, Ukraina, Bulgaria, Yunani, Siprus Utara serta tuan rumah Turki. Dalam acara festival ini penampilan kesenian dari tim Indoensia dilakukan di area panggung terbuka (*out door*) sehingga mereka bisa

memperlihatkan nilai – nilai kesenian Indonesia di tengah – tengah masyarakat Turki serta menghibur para wisatawan yang tengah berkunjung di kota Kesan.

Diplomasi kebudayaan yang dilakukan tim Indonesia pada waktu itu tidak hanya bertajuk pada gerak tarian dan permainan musik tradisional saja tetapi dilakukan juga dengan pengenalan kuliner khas masakan – masakan Indonesia. Dalam agenda *Indonesian Night* grup dari Indonesia diberikan kesempatan untuk menyuguhkan masakan mereka kepada seluruh tim dari keenam delegasi negara serta Walikota Kesan sebagai perwakilan dari pemerintah Turki. Aneka kuliner yang ditawarkan seperti kerupuk, abon, mi instan dan ayam goreng khas jawa tersebut terlihat menggugah selera para partisipan yang hadir dalam acara itu, sehingga sebagai bentuk apresiasi maka panitia menobatkan *Indonesian Night* sebagai kategori *The Best Night* dalam acara tersebut. Dipuncak acara grup dari Indonesia kembali menampilkan atraksi musik dan tarian yang kian mencuri perhatian penonton dengan gerakan yang sangat dinamis, dengan disadari atau tidak, mereka telah berpartisipasi dengan ikut menunjang diplomasi kebudayaan terhadap publik Turki mengenai keragaman dan kekayaan seni budaya Indonesia (Kemlu n.d.).

Sayangnya bahwa aplikasi akan kegiatan diplomasi budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Turki sendiri, saat ini dinilai masih sangat minim. Baik dari institusi terkait seperti halnya kementerian luar negeri pada umumnya dalam menjalankan diplomasi publik. Hubungan interaksi dalam esensi kebudayaan ke negara Turki terlebih masih didominasi oleh aktivitas dari masyarakat

sipil terutama dari kalangan akademisi dan wisatawan. Meskipun aktivitas yang telah dilakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai diplomasi budaya, kegiatan tersebut kurang terkoordinasi, misalnya ke media massa ataupun Kedutaan Besar Indonesia di Ankara sehingga mereka yang melakukan diplomasi publik tidak terekspos dan kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Indonesia.

D. Perkembangan Kerjasama Pariwisata Indonesia Dan Turki Di Era

Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pembangunan pariwisata memerlukan kebijakan dan perencanaan yang sistematis. Sebagai contoh, pemerintah pada semua level terlibat dalam mempersiapkan infrastruktur, penggunaan tanah atau tata ruang, dan sebagainya. Untuk tercapainya sebuah perencanaan yang sistematis diperlukan sebuah proses perencanaan strategis (*the strategic planning process*). Menurut Richardson & Fluker (Fluker 2004), umumnya perencanaan strategis dalam pariwisata terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

1. Menentukan bisnis/usaha apa yang akan dimasuki, yang biasanya dicirikan oleh misi organisasi yang tergantung pada jenis usaha yang dimasuki. Misi organisasi mungkin dapat dilihat dan diketahui dengan mudah tetapi misi organisasi terkadang tidak dapat secara ekplisit dikenali. Misalnya sebuah hotel dalam misi perusahaannya tetapi memaksimalkan pengembalian aset dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan untuk para pemegang saham. Biasanya untuk organisasi pemerintah dengan *audiens* yang berbeda yang akan diyakinkan,

mempunyai misi yang jelas, misalnya untuk mengakselerasi pertumbuhan sosial ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan dari industri pariwisata bagi negara.

2. Menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai, yang merupakan tujuan organisasi seperti penguasaan pasar yang melibatkan pengenalan produk baru. Tujuan organisasi haruslah mempunyai jangka waktu yang mengindikasikan kapan tujuan tersebut akan diwujudkan. Hal ini akan memberikan kerangka waktu, menetapkan tujuan jangka pendek, dan strategi pencapaian serta tindakan yang diperlukan.
3. Mengevaluasi potensi pasar, merupakan proses cepat untuk mengidentifikasi pasar potensial dan memuaskan penanam modal bahwa terdapat pasar pariwisata yang potensial yang menyebabkan proses selanjutnya layak dilakukan.
4. Pilih lokasi wisata yang cocok. Lokasi yang dipilih harus dilakukan dengan hati – hati dan dikaitkan dengan ketersediaan infrastruktur seperti ketersediaan jalan, listrik, air, atraksi wisata yang tersedia dan pesaing. Keberadaan proyek harus dapat memanfaatkan keunggulan destinasi lokal menarik calon konsumen. Lokasi yang dipilih juga menyangkut pada keberadaannya yang dapat dipastikan tidak ada masalah yang menyangkut apa yang boleh dan apa yang tidak boleh terkait dengan rencana pembangunan fasilitas pariwisata. Disamping itu perlu dijalin komunikasi dengan masyarakat lokal, biro hukum, arsitek termasuk kompetitor.
5. Aksesibilitas. Pengembangan pariwisata sebagai sebuah sistem, faktor aksesibilitas, baik berupa perencanaan perjalanan, penyediaan informasi mengenai rute dan

destinasi, ketersediaan sarana transportasi, akomodasi, ataupun kemudahan lain untuk mencapai destinasi menjadi penentu berhasilnya peluang pengembangan destinasi. Aksesibilitas juga menyangkut manajemen informasi kawasan pengembangan bagi calon wisatawan mengingat keunikan destinasi. Akses informasi bisa dari mulut ke mulut, dari keluarga ke teman, buku – buku pariwisata, brosur, tabloid, iklan, internet dsb. Dalam *tourism opportunity spectrum* semakin mudah aksesibilitas ke destinasi pariwisata maka semakin besar peluang keberhasilan penegmbangannya.

6. Kompabilitas dengan kegiatan lain. Keberhasilan pengembangan destinasi pariwisata sangat ditentukan oleh kompabilitasnya terhadap aktivitas lain yang mendukung di kawasan pengembangan. Sifat interdependensi, baik sumber daya maupun dampak suatu kegiatan di suatu kawasan terhadap kawasan lain, menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan destinasi pariwisata. Yang perlu diperhatikan adalah sampai level mana sebuah kawasan pengembangan dapat mempengaruhi kawasan lain dari kondisi yang bagaimana yang paling optimal dan baik untuk menunjang kawasan pengembangan. Beberapa aktivitas dapat berdampak langsung, seperti penebangan hutan, pembuangan limbah, penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang dan sebagainya. Sebab semakin tinggi dearajat kompabilitas pengembangan destinasi pariwisata maka semakin besar peluang pengembangan.

7. Karakteristik sarana pariwisata. Penyediaan sarana pariwisata sangat menentukan peluang pengembangan sebuah destinasi pariwisata. *On-site management*, penataan sarana pariwisata, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas baru, penanaman atau introduksi vegetasi, akomodasi, tempat perbelanjaan, fasilitas hiburan, serta penataan akses lalu lintas ke kawasan, sangat menentukan keberhasilan pengembangan destinasi pariwisata. Pembangunan sarana pariwisata ini memerlukan modifikasi kawasan destinasi yang bisa saja berakibat sangat kompleks. Penyediaan sarana pariwisata yang mempunyai karakteristik tidak sesuai dengan ekosistem dan sifat alamiah destinasi mungkin akan memperkecil peluang keberhasilan pengembangan destinasi pariwisata tersebut.
8. Interaksi sosial. Kedatangan wisatawan pada suatu destinasi wisata, terlebih destinasi yang mengandalkan sumber daya alam dan kehidupan ekosistem sebagai atraksi utamanya, mempunyai potensi untuk merusak keseimbangan ekosistem tersebut. Dalam derajat tertentu, ekosistem sosial dan ekosistem alamiah yang akan terpengaruhi. Konsekuensinya, eksistensi kawasan tersebut akan selalu dalam ancaman degradasi kualitas. Dalam sistem kepariwisataan, ada dua kondisi interaksi manusia yang harus dipertimbangkan. Pertama, interaksi manusia dengan lingkungan/ekosistem yang mempengaruhi ekosistem alam. Kedua, interaksi antara wisatawan dengan komunitas lokal yang dapat mempengaruhi ekosistem sosial. Interaksi ini dapat berupa adaptasi atau peningkatan kadar gangguan yang

dirasakan oleh komunitas lokal seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan yang melampaui batas atau daya dukung sosial.

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi, dimana pada awalnya hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang, namun kini bahkan telah menjadi hak asasi seseorang sebagaimana dinyatakan oleh John Naisbitt bahwa *where once travel was considered a privilege of the moneyed elite, now it is considered a basic human right* (Naisbitt 1994). Negara Indonesia yang dikenal sebagai negeri 1001 pulau, merupakan sebuah julukan yang menggambarkan bagaimana karakteristik Indonesia dari segi geografisnya. Secara mutlak bahwa wilayah Indonesia yang membentang sejauh 3.977 mil dari wilayah Pulau Sumatera hingga ke dataran Papua memperlihatkan pula nilai dari aset - aset yang dimiliki oleh negara ini. Hal ini juga tidak terlepas dari kekayaan kultur dan budaya yang dimiliki hingga tersebar di seluruh bagian pelosok nusantara (Wisata Indonesia 2011).

Cara berpikir sistem pada sektor pariwisata adalah melihat pariwisata sebagai suatu aktivitas yang jauh lebih kompleks, dapat dipandang sebagai suatu sistem yang lebih besar, memiliki berbagai komponen, seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya dan seterusnya. Melihat pariwisata sebagai suatu sistem berarti bahwa adanya analisis mengenai berbagai aspek kepariwisataan tidak bisa dilepas dari subsistem yang lain karena adanya hubungan saling ketergantungan dan saling terkait (*interconnectedness*). Sebagai sebuah sistem antarkomponen dalam sistem tersebut

terjadi hubungan interdependensi yang berarti bahwa perubahan salah satu subsistem akan menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem yang lain sehingga didapatkan harmoni yang baru. Elemen – elemen dari sebuah sistem pariwisata yang sederhana antara lain menyangkut sebuah daerah/negara wisatawan, sebuah daerah/negara tujuan wisata dan sebuah tempat transit serta sebuah *generator* yang membalik proses tersebut.

Negara Indonesia sebagai salah satu daerah kunjungan wisata Asia memang memiliki segudang potensi dan nilai lebih dalam sektor kepariwisataan. Secara strategis yang terletak di garis khatulistiwa sekaligus menempatkan corak iklim yang ideal untuk aktivitas pariwisata. Keragaman budaya, kesenian, benda peninggalan sejarah, suku adat, bahasa maupun kekhasan kuliner masing – masing etnik juga menjadi elemen pendukung sebagai daya tarik para wisatawan, khususnya pelancong dari negara lain. Hal ini yang kemudian menyingkapkan bagaimana perubahan sekaligus perkembangan sektor kepariwisataan di Indonesia hingga 6 % di atas pertumbuhan pariwisata dunia yang hanya mencapai 4% (organisasi Pariwisata Dunia PBB (UN-WTO) 2011), indeks pertumbuhan pemasukan jumlah devisa per 2010 mencapai US\$ 7 Miliar melebihi target pendapatan semula senilai US\$ 6,5 Milliar (news 2010). Sehingga turut mendorong upaya peningkatan hubungan sektor pariwisata antara Indonesia dan Turki.

Tabel kedatangan wisatawan mancanegara masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama (tahun 2004 – 2009)

Negara Asal	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Amerika Total	209 779	209 511	184 525	220 202	239 678	229 824
Eropa Total	720 706	798 408	730 398	796 730	924 745	978 369
Afrika	35 507	27 450	22 655	27 777	29 753	28 375
Timur Tengah	35 783	60 601	55 033	55 348	67 271	122 069
Asean Total	2 431 154	2 174 006	2 328 345	2 490 076	2 794 607	2 772 684
Asia Pasifik Total	1 888 236	1 732 125	1 550 395	1 915 626	2 178 443	2 192 409
Total Keseluruhan	5 321 165	5 002 101	4 871 351	5 505 759	6 234 497	6 323 730

Tabel jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik Negara (B. P. Indonesia 2015)

Menurut data tersebut peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun pada tahun 2006 jumlah kedatangan wisatawan mancanegara sempat menurun. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tragedi Bom Bali 2 pada tahun 2005 yang kembali menghempaskan Indonesia beserta ekonominya termasuk industri pariwisata dalam negeri Indonesia.

Tragedi Bom Bali 2 yang terjadi pada 1 Oktober 2005, kembali mengguncang bumi Indonesia dengan meledaknya 3 bom di 2 daerah wisata di Bali, dua di Jimbaran dan satu di Kuta. Akibat dari insiden ini, 23 orang tewas kebanyakan korban yang meregang nyawa itu adalah warga asing. Selain korban tewas juga terdapat pula

wisatawan asing dan warga lokal yang menderita luka-luka. Jumlahnya pun tidak sedikit sampai 196 orang (Tuwo 2015).

Teror bom yang menimpa negara Indonesia ini memiliki dampak negatif yang tidak sedikit bagi bangsa ini. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya *travel ban* dan juga *travel advisory* oleh beberapa negara dunia yang menghimbau warga negaranya untuk tidak berkunjung ke Indonesia, terutama Jakarta dan Bali serta daerah-daerah sekitar Indonesia (Santosa 2012). Dampak negatif bencana tersebut sangat terasa bagi sektor kepariwisataan Indonesia serta instrumentnya seperti restoran, hotel, resort dan lain sebagainya yang menjadi sepi. Selain itu, tindakan terorisme itu telah membuat bangsa Indonesia tercoreng di mata dunia saat itu.

Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tragedi bom berturut turut yang melanda Indonesia tersebut sangat mempengaruhi jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Tragedi tersebut meninggalkan jejak pahit bagi dunia kepariwisataan Indonesia. Selain kerugian harta benda yang bernilai, bencana tersebut juga meninggalkan citra yang buruk bagi pariwisata Indonesia di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akibatnya secara langsung maupun tidak langsung, pendapatan devisa negara pun turut menurun.

Kemudian pada periode kedua Presiden SBY menjabat sebagai pemimpin Indonesia, pembenahan dan promosi pariwisata melalui kerjasama dengan Turki kembali gencar dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk kembali menarik minat

wisatawan asing terutama dari Turki untuk menjadikan Indonesia destinasi wisata yang aman dan menarik. Melalui diplomasi budaya yang digunakan pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut dianggap cukup berhasil dalam membangun pariwisata nasional Indonesia kembali. Hal itu dapat dilihat dari terdapatnya kenaikan yang begitu signifikan setiap tahunnya dimulai dari tahun 2009 saat pertama di periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat hingga akhir masa jabatannya yaitu pada tahun 2014.

Tabel kedatangan wisatawan mancanegara masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua (tahun 2009 – 2014)

Negara Asal	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Amerika Total	229 824	258 584	297 061	312 209	333 150	358 707
Eropa Total	978 369	1 038 420	1 045 865	1 108 521	1 243 005	1 332 593
Afrika	28 375	27 200	31 640	41 583	51 298	56 503
Timur Tengah	122 069	144 661	175 885	148 788	188 676	195 518
Asean Total	2 772 684	3 052 285	3 284 664	3 375 291	3 581 420	3 751 074
Asia Pasifik Total	2 192 409	2 481 794	2 814 616	3 058 070	3 404 580	3 741 016
Total Keseluruhan	6 323 730	7 002 944	7 649 731	8 044 462	8 802 129	9 435 411

Tabel Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik Negara (B. P. Indonesia 2015)

Pada periode kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia kembali mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan jumlah tersebut melebihi jumlah wisatawan mancanegara yang datang pada tahun – tahun sebelumnya di periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden Indonesia .

Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara setiap tahunnya tersebut tidak terlepas dari peningkatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan yang strategis dalam menggunakan diplomasi kebudayaan Indonesia dapat mempengaruhi akan seperti apa kondisi pariwisata Indonesia.

Diplomasi kebudayaan yang di jalankan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan kerjasama bidang pariwisata dengan Turki bertujuan untuk meningkatkan kualitas pariwisata dalam negeri yang kemudian diharapkan akan dapat mendatangkan wisatawan mancanegara. Dengan begitu devisa yang dihasilkan dari kedatangan wisatawan asing dapat menguntungkan negara Indonesia.

Oleh karena itu, devisa yang diterima Indonesia meningkat dari kedatangan wisman yang mengunjungi Indonesia. Kedatangan wisman yang meningkat dari tahun 2004 hingga 2014 menjadikan Indonesia mendapat devisa negara yang meningkat pula.

Tabel penerimaan devisa Indonesia melalui wisatawan mancanegara di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Tahun	Devisa Wisman (Juta US\$)
2004	4,797.88
2005	4,521.90
2006	4,447.98
2007	5,345.98
2008	7,347.60
2009	6,297.99
2010	7,603.45
2011	8,554.39
2012	9,120.89
2013	10,054.15
2014	11,166.13

Sumber : Badan Pusat Statistik (Statistik, Jumlah Wisatawan Asing Tahun 1974 - 2014, Devisa Wisman 1998-2014 2016)

Jumlah devisa yang dihasilkan melalui wisatwan mancanegara yang berkunjung Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari tahun pertama Prseiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat. Kenaikkan tersebut tidak semata tanpa alasan,

namun kenaikan jumlah tersebut merupakan dampak dari strategi *soft diplomacy* melalui diplomasi budaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam kerjasama di sektor pariwisata dengan Turki

Hal tersebut dirasa cukup berhasil terlihat di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhitung jumlah wisatawan mancanegara dari berbagai negara dunia yang datang berkunjung ke Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Kenaikkan jumlah tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai strategi diplomasi kebudayaan serta implementasi kebijakan dalam sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sedemikian rupa untuk menarik minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia.